

PRESS RELEASE

BPK PERWAKILAN PROVINSI KALBAR



BPK RI Serahkan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang TA 2021

Pontianak, 20 Mei 2022 – Setelah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sekadau pada Jum'at pagi ini (20/05), Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (BPK Kalbar) kembali menggelar penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran (TA) 2021 di Ruang Rapat Kepala Perwakilan Lantai II BPK Kalbar pada pukul 14.00 WIB. LHP tersebut diserahkan secara langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Kalbar, **Rahmadi** kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang, **Fransiskus**, dan Bupati Bengkayang, **Subandrio**. Turut hadir dalam acara penyerahan tersebut yaitu Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang, **Yustianus**, Kepala Sub Auditorat Kalbar I, **Yudi Prawiratman**, Kepala Sub Auditorat Kalbar II, **Heribertus Kurniawan**, dan Kepala Sekretariat Perwakilan, **Maksum**.

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang TA 2021 dalam segala hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan bukti/dokumen pertanggungjawaban dan kelengkapan pengungkapan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan.

Permasalahan yang masih ditemukan di Pemerintah Kabupaten Bengkayang diantaranya adalah kesalahan penganggaran belanja, kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa, gaji, tunjangan dan honorarium, pelampauan anggaran dan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah belum tertib, pengelolaan kas dan setara kas belum tertib, pengelolaan aset tetap belum tertib dan belum memadai.

Atas temuan permasalahan terkait Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten

Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Kalbar

Jl. Ahmad Yani, Pontianak Telp. (0561) 585349 ext. 205

Website: pontianak.bpk.go.id, Email: bpkpontianak@gmail.com

Bengkayang TA 2021, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah memiliki kebijakan pencatatan, penyajian dan pengungkapan aset tetap dan aset lainnya, namun belum dilaksanakan secara memadai diantaranya aset tetap peralatan dan mesin serta aset tetap gedung dan bangunan yang belum dirinci, aset tetap gedung dan bangunan serta aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan yang belum diketahui aset induknya, dan aset tetap peralatan dan mesin serta aset tetap jalan irigasi dan jaringan yang penghitungan masa manfaatnya berbeda dengan kebijakan akuntansi.

Dampak salah saji tersebut mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan pada nilai beban penyusutan dan nilai akumulasi penyusutan. Dengan kondisi ini, BPK tidak dapat memperoleh bukti-bukti yang cukup dan tepat tentang nilai aset tetap, karena data dan informasi pada satker terkait, sehingga BPK tidak yakin untuk melakukan penyesuaian nilai aset tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, BPK RI berpendapat bahwa posisi Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang tanggal 31 Desember 2020 telah disajikan secara wajar, dalam segala hal yang material, **KECUALI** untuk dampak dari pencatatan aset tetap yang belum memadai atau dengan kata lain **"Wajar Dengan Pengecualian (WDP)"**.

Sebagai penutup, Kepala Perwakilan mengharapkan Pemerintah Kabupaten Bengkayang memberikan perhatian yang serius dengan segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan BPK melalui Laporan Hasil Pemeriksaan agar akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah dapat terpelihara.

SUBBAGIAN HUMAS & TU KALAN
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALBAR